

PENGARUH 'STRING OF PEARL' TIONGKOK TERHADAP PENCAPAIAN MP3EI DALAM KONTEKS PASAR BEBAS ASEAN 2015

THE INFLUENCE OF CHINA'S 'STRING OF PEARL' TOWARDS MP3EI'S ACHIEVEMENT IN THE CONTEXT OF FREE MARKET ASEAN 2015

Erlinda Matondang¹

Universitas Pertahanan Indonesia
(erlinda.matondang@gmail.com)

Abstrak – *String of Pearl (SoP)* merupakan strategi Tiongkok dalam menyebarkan pengaruh ekonominya dari daratan Tiongkok menuju Timur Tengah dengan melalui wilayah strategis, seperti Selat Malaka dan Samudera Hindia, yang merupakan bagian dari Indonesia. Strategi ini akan memengaruhi pencapaian MP3EI, yang menjadi pedoman pembangunan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), yang memperluas akses Tiongkok ke wilayah strategis tersebut, memberikan dampak terhadap pembangunan koridor-koridor ekonomi Indonesia, khususnya dalam kerangka MP3EI. Tulisan ini mengulas dampak SoP Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang dimotori oleh MP3EI, khususnya di era KEA. Ulasan ini menunjukkan strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meminimalisasi dampak SoP terhadap pencapaian MP3EI dalam konteks pasar bebas ASEAN 2015. Potensi-potensi Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tawar dalam diplomasi dan negosiasi dengan Tiongkok juga disampaikan dalam ulasan singkat di bagian akhir tulisan ini.

Kata Kunci: *String of Pearl (SoP)*, KEA, MP3EI

Abstract – *String of Pearl (SoP)* is China's strategy to expand its influence from China Mainland to the Middle East through strategic areas, like Malacca Strait and Indian Ocean which are parts of Indonesian. This strategy will give some influences to MP3EI's achievement that will be the fundamental and direction of Indonesian economic building. The implementation of ASEAN Economic Community (KEA) that expand China's access to strategic areas will influence the Indonesian economic corridors' building, specialized in MP3EI framework. This study will discuss about the influence of SoP's China towards Indonesian economic building, which is driven by MP3EI in AEC era. This review shows the available strategy for Indonesia to minimize the influence of SoP to achievement of MP3EI in the context of free market 2015. Indonesia's potencies which available to used for increasing leverage in diplomacy and negotiation against China also written shortly in the last part of this review.

Keywords: *String of Pearl (SoP)*, KEA, MP3EI

¹ Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia. Penulis meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP) dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tahun 2013. Penulis merupakan finalis Puteri Indonesia tingkat Jawa Tengah tahun 2011. Penulis juga merupakan guru pribadi (*Private Tutor*) untuk mata pelajaran eksakta.

Pendahuluan

Modernisasi semakin merebak di Asia Tenggara. Dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Robert Gilpin menyatakan bahwa era modern ditandai dengan penggabungan perekonomian dan integrasi negara-bangsa, sehingga membentuk wilayah yang luas.² Hal tersebut yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia dan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara sudah membentuk *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) sejak tahun 1967. Namun, integrasi dalam bidang ekonomi baru akan dimulai pada tahun 2015. Integrasi ekonomi tersebut dikembangkan hingga keluar wilayah Asia Tenggara. Negara-negara Asia lainnya, seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang juga turut di dalam integrasi ekonomi tersebut. Bahkan, ASEAN juga merangkul negara-negara Barat, seperti Rusia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia.

Sebagaimana teori yang disampaikan Gilpin bahwa pembentukan institusi baru, terutama di tingkat regional, bertujuan untuk mengatasi kegagalan pasar, menyelesaikan permasalahan secara terkoordinasi, dan mengurangi halangan terhadap kerja sama ekonomi.³ Begitupula tujuan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Liberalisasi perdagangan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pasar dengan cara yang terkoordinasi dan mengurangi halangan terhadap kerja sama ekonomi.

ASEAN membentuk komunitas yang terdiri dari tiga pilar, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Pilar yang saat ini mendapatkan banyak sorotan masyarakat internasional adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). Pada tahun 2015, pasar bebas ASEAN, yang merupakan tujuan dari KEA, akan diberlakukan. Kesiapan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, menjadi perhatian utama.

Dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN, Indonesia sudah menyusun Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di dalam MP3EI tercantum upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam

² Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, (Princeton: Princeton University Press, 2001), hlm. 344.

³ *Ibid.*, hlm. 345.

membangun potensi daerah yang digolongkan ke dalam bentuk koridor-koridor ekonomi. Keberhasilan MP3EI menentukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 dan pencapaiannya di masa yang akan datang.

Tiongkok merupakan salah satu negara mitra kerja sama ASEAN. Tiongkok menerapkan strategi 'String of Pearl' (SoP) dalam mengembangkan pengaruhnya ke negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Strategi tersebut membentuk sebuah jalur yang menghubungkan Tiongkok dengan Teluk Persia melalui Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka. Pengaruh yang diberikan Tiongkok dalam kerangka SoP dapat berbentuk militer maupun ekonomi.

SoP Tiongkok mempunyai potensi yang besar dalam memengaruhi pencapaian MP3EI. Pengaruh yang dimunculkan oleh SoP Tiongkok terhadap MP3EI akan berpengaruh pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Pengaruh yang dikembangkan SoP Tiongkok tersebut tidak hanya berlaku pada masa kini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat digolongkan sebagai hal yang krusial.

Tulisan ini membahas tentang pengaruh pengembangan SoP Tiongkok terhadap pencapaian MP3EI, terutama dalam kerangka pelaksanaan KEA. Pembahasan yang tertuang dalam tulisan ini hanya terbatas pada strategi yang dapat dikembangkan Indonesia untuk mengembangkan MP3EI dan menghadapi SoP Tiongkok. Analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap kondisi terkini Indonesia dan Tiongkok. Tulisan ini diakhiri dengan penjabaran mengenai potensi-potensi Indonesia yang dapat digunakan untuk menyetarakan posisi atau meningkatkan daya tawar dalam diplomasi dan negosiasi dengan Tiongkok.

Tulisan ini berbentuk ulasan dari sejumlah referensi yang membentuk serangkaian fakta dan konsep yang membangun pemahaman menyeluruh tentang permasalahan tersebut. Tulisan ini dibentuk melalui metode studi pustaka. Oleh karena itu, jurnal ini tidak dapat memberikan solusi mendalam terhadap kebijakan pemerintah, tetapi dapat menjadi kajian dan pengembangan wawasan, termasuk dalam membentuk kebijakan.

Pembahasan

Kebijakan *String of Pearl* Tiongkok

Pada awal abad ke-21, Tiongkok melakukan perbaikan dalam tataran pemerintah dan hubungannya dengan negara lain. Dalam upaya perbaikan tersebut, pemerintah Tiongkok mengklasifikasikan wilayahnya menjadi bagian inti dan pinggiran. Perbaikan kondisi domestik Tiongkok dilakukan dengan pembangunan daerah pinggiran atau pesisir, yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap wilayah inti. Pembangunan wilayah pinggiran ini didukung dengan kebijakan luar negeri Tiongkok yang memosisikan kelautan Tiongkok sebagai wilayah strategis dan mempunyai potensi ekonomi kontemporer.⁴

Kelautan Tiongkok menjadi perhatian utama pemerintah Tiongkok saat ini. Hal ini yang mendorong Tiongkok mengeluarkan berbagai kebijakan luar negeri di bidang kelautan. Kebijakan-kebijakan itu dinilai, oleh sejumlah pengamat, sebagai strategi diplomasi Tiongkok. Strategi diplomasi Tiongkok ini yang disebut dengan *String of Pearl* (SoP).

Strategi SoP Tiongkok dikembangkan dalam upaya penyebaran pengaruh geopolitik. Istilah 'pearl' yang digunakan dalam strategi tersebut merujuk pada daerah-daerah yang dilewati jalur laut dari daratan utama Tiongkok melewati pantai Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Samudera Hindia, menuju pesisir Laut Arab dan Teluk Persia.⁵ Pemberian bantuan dan proyek pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok kepada negara-negara yang berada di pesisir Samudera Hindia merupakan bagian dari implementasi atau bukti pengembangan SoP.⁶ Sebagian besar proyek yang dibangun Tiongkok dalam kerangka SoP merujuk pada upaya untuk mengisi atau memperlancar jalan di Selat Malaka.⁷ Adapun hasil dari proyek pembangunan yang

⁴ W. Lawrence S. Prabhakar, "China's 'String of Pearls' in Southern Asia-Indian Ocean: Implication for India and Taiwan" dalam M.J. Vinod, et.al. (eds), *Security Challenges in the Asia-Pacific Region: The Taiwan Factor*, (New Delhi: Viva Books International, 2009), hlm. 2.

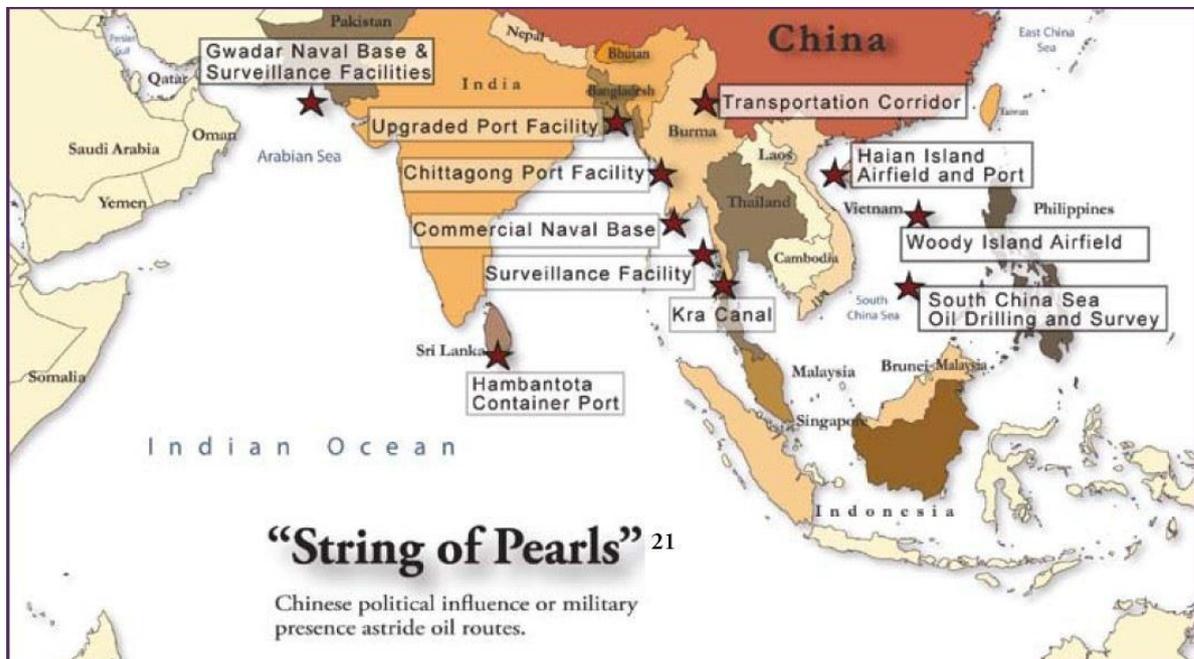
⁵ Christopher J. Pehrson, *String of Pearls: Meeting the Challenge of China's Rising Power Across the Asian Littoral*, (Carlisle: Strategic Studies Institute, 2006), hlm. 3.

⁶ Virginia Marantidou, "Revisiting China's 'String of Pearls' Strategy: Places 'with Chinese Characteristics' and Their Security Implication", *Issues & Insights*, Vol. 14, No. 7, Juni 2014.

⁷ Shee Poon Kim, "An Anatomy of China's 'String of Pearls' Strategy", *The Hikone Ronso*, No. 387, 2011, hlm. 32-34.

diberikan Tiongkok kepada negara-negara pesisir Samudera Hindia dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1. Proyek-proyek Tiongkok di Negara-negara Pesisir Samudera Hindia dan Pasifik



Sumber: Virginia Marantidou, “Revisiting Tiongkok’s ‘String of Pearls’ Strategy: Places ‘with Chinese Characteristics’ and Their Security Implication”, *Issues & Insights*, Vol. 14, No.7, 2014.

Pada dasarnya SoP merupakan bagian dari upaya penguatan pertahanan Tiongkok, tetapi dalam pengembangannya orientasi strategi lebih condong pada bidang perekonomian. SoP melingkupi wilayah-wilayah strategis yang bernilai ekonomis dan politis. SoP Tiongkok tersebut berpengaruh terhadap hubungannya dengan negara-negara pantai. Pengaruh SoP terhadap hubungan Tiongkok dengan negara pantai di sekitarnya digambarkan dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok harus berhadapan dengan lima negara yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut. Konflik tersebut melingkupi empat wilayah sengketa, yaitu Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, tiga pulau Pratas, dan Macclefield Banks. Pulau Spratly diklaim oleh Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam, sedangkan pulau-pulau kecil yang berada di sekeliling Spratly diklaim oleh Malaysia dan Filipina. Brunei mengeluarkan kebijakan zona maritim yang mencapai karang selatan, tetapi tidak mengeluarkan klaim formal atas wilayah tersebut. Sementara itu, Pulau Paracel, diklaim oleh Taiwan, dan Tiongkok. Karang Scarborough, yang berada di antara

Filipina dan Pulau Paracel, menjadi perebutan Tiongkok dan Filipina. Pulau Pratas, yang berada di barat daya Hongkong, diokupasi oleh Taiwan dan diklaim oleh Tiongkok. Macclesfield Bank diklaim oleh Tiongkok dan Taiwan.⁸

Keempat wilayah sengketa tersebut sangat kaya dengan sumber daya alam, khususnya sumber energi, seperti minyak bumi. Selain itu, kawasan yang dilewati oleh jalur SoP juga sangat kaya dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, SoP yang diterapkan Tiongkok bertujuan untuk mengembangkan pengaruh perekonomian di wilayah pesisir Asia, Afrika dan Amerika Latin.⁹

SoP menjadi alat pendukung atau senjata Tiongkok untuk membangun akses ke daerah pesisir yang potensial, sehingga Tiongkok dapat mengembangkan investasi perdagangan dan pengembangan regional. Tiongkok mendorong investasinya untuk mengambil kesempatan optimal terhadap sumber daya dan pasar yang ‘menguntungkan’. Pelaksanaan SoP Tiongkok di dalam hubungan antarnegara diimbangi dengan strategi *Going Out*, yaitu strategi peningkatan konsumsi domestik, industri, dan potensi produksi dengan tujuan menghapuskan kompetisi. Selain itu, Tiongkok juga membangun *Sea Lines of Communication* (SLoC) yang menghubungkan negaranya dengan wilayah Timur Tengah, serta bertujuan untuk perluasan komunikasi laut dalam peningkatan perdagangan dan usaha komersial.¹⁰

Pencapaian MP3EI

Indonesia mempunyai visi yang harus dicapai pada tahun 2025. Visi tersebut terfokus pada: peningkatan kualitas hasil produksi barang jadi, baik pada proses industri maupun peningkatan efisiensi jaringan distribusi; upaya mendorong efisiensi produksi dan mengubah pemasaran untuk mengintegrasikan pasar domestik serta meningkatkan kompetisi dan ketahanan ekonomi nasional; dan upaya untuk meningkatkan sistem

⁸ Robert Beckman, “The South China Sea: the Evolving Dispute between China and Her Maritime Neighbours”, *Geomatics World*, Vol. 21 No. 3.

⁹ W. Lawrence S. Prabhakar *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

inovasi nasional, baik dalam bidang produksi, proses maupun pemasaran yang bertujuan untuk penguatan daya saing global.¹¹

Pembentukan MP3EI berdasarkan pada tiga pilar, yaitu meningkatkan potensi daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap koridor, memperkuat konektivitas nasional, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) beserta ilmu pengetahuan dan teknologi.¹² Untuk meningkatkan potensi daerah, pemerintah membagi wilayah Indonesia ke dalam enam koridor dengan spesifikasi yang berbeda tetapi masih saling bersinergi. Adapun koridor-koridor tersebut, antara lain.

1. Koridor Ekonomi Sumatera, yang bertemakan “Pusat Produksi dan Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) dan Energi Cadangan Negara.”
2. Koridor Ekonomi Jawa, yang bertemakan “Pengendali Industri Nasional dan Penyedia Layanan.”
3. Koridor Ekonomi Kalimantan, yang bertemakan “Pusat Produksi dan Pengolahan Bahan Tambang dan Energi Cadangan Nasional.”
4. Koridor Ekonomi Sulawesi, yang bertemakan “Pusat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, serta Minyak dan Gas Nasional.”
5. Koridor Ekonomi Bali—Nusa Tenggara, yang bertemakan “Pintu Gerbang Pariwisata dan Dukungan Pangan Nasional.”
6. Koridor Ekonomi Papua—Kepulauan Maluku, yang bertemakan “Pusat Pengembangan Produksi Makanan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional.”¹³

Penguatan konektivitas nasional Indonesia terdiri dari empat elemen kebijakan, yaitu sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pembangunan daerah, serta teknologi dan informasi.¹⁴ Konektivitas nasional tidak hanya mengenai keterikatan di

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2011), hlm. 15.

¹² *Ibid.*, hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

tingkat nasional, tetapi juga elemen di setiap koridor ekonomi hingga pada tataran perdagangan logistik nasional. Oleh karena itu, konektivitas tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu konektivitas intrakoridor, pengembangan interkoridor, dan perdagangan logistik internasional.¹⁵

Pembentukan konektivitas nasional dengan bentuk demikian mempunyai visi yang berbunyi *Locally Integrated, Globally Connected*.¹⁶ Dalam konektivitas perdagangan internasional dan menuju visi *Globally Connected*, Indonesia mengoptimalkan pemanfaatan SLoC dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). SLoC berlaku untuk wilayah Selat Malaka, ALKI 1 meliputi Selat Sunda, ALKI 2 meliputi Selat Lombok dan Makassar, dan ALKI 3 meliputi Selat Ombai Wetar. Pembentukan SLoC dan ALKI ini juga bertujuan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia yang mempunyai garis pantai sepanjang 54.716 km, melintasi Samudera Hindia, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor dan wilayah kecil lainnya.¹⁷

MP3EI mempunyai prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap langkah dan upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar MP3EI.

1. Perubahan harus memberi pengaruh positif kepada *stakeholder* negara.
2. Perubahan dalam pola pikir dimulai dari birokrasi pemerintahan.
3. Perubahan membutuhkan semangat dalam bekerja dan keinginan kuat untuk mengembangkan kolaborasi dalam lingkungan kompetisi yang sehat.
4. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan produktivitas, inovasi, dan kreativitas.
5. Peningkatan jiwa kewirausahaan.
6. Sektor swasta sebagai aktor penting dalam pengembangan ekonomi
7. Sosialisasi mengenai penerapan prinsip-prinsip perkembangan berkelanjutan.
8. Sosialisasi mengenai perubahan pola pikir untuk mengubah kesejahteraan yang diangkat secara ekstensif oleh semua *stakeholder* negara.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

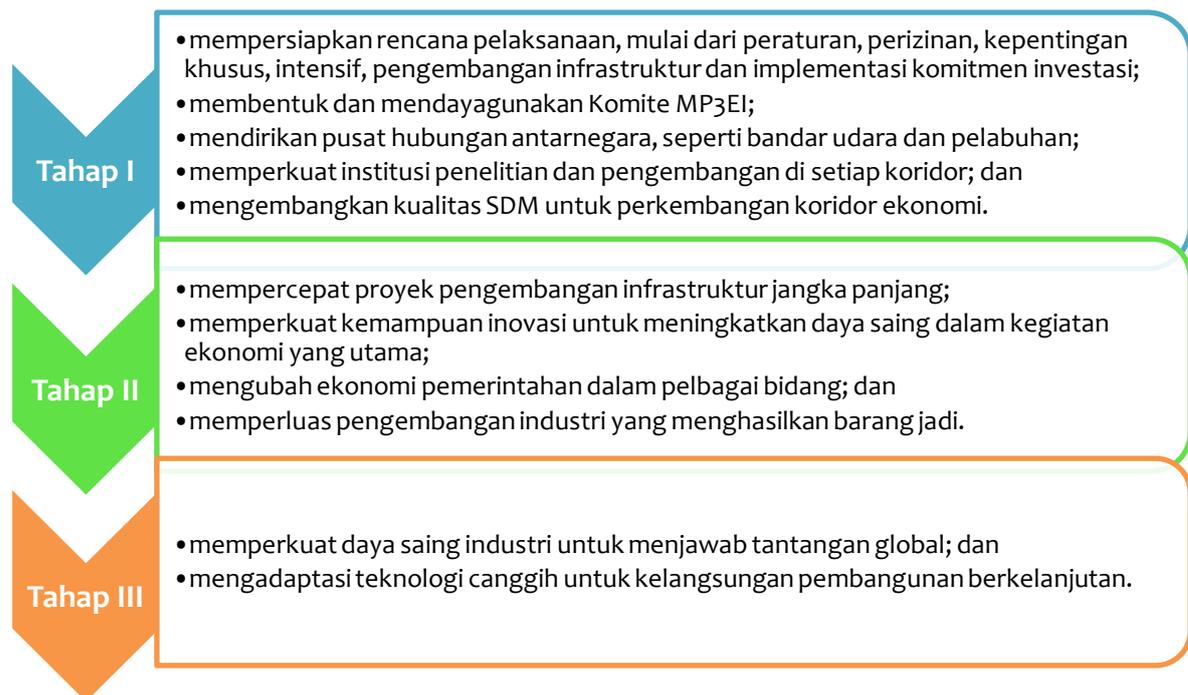
¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

Implementasi MP3EI dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama dilakukan pada periode 2011-2015 dan disebut sebagai pelaksanaan *quick wins* dan berfokus pada operasionalisasi Komite MP3EI. Tahapan kedua dilakukan pada periode 2016-2020 dengan fokus pada penguatan basis ekonomi dan investasi. Tahapan ketiga dilaksanakan pada periode 2021-2025 dengan berfokus pada penerapan pertumbuhan berkelanjutan.¹⁹

Bagan 1. Tahapan Implementasi MP3EI



Berdasarkan tahapan implementasi MP3EI tersebut, Indonesia saat ini masih berada pada tahap I. Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk upaya-upaya intensif dalam mencapai visi MP3EI. Hal-hal yang dilakukan pemerintah Indonesia masih berada dalam taraf yang paling mendasar, seperti pembentukan komite, pengembangan koridor beserta dengan institusi penelitian dan pengembangan di dalamnya.

Walaupun implementasi MP3EI masih dalam tahap awal, Indonesia sudah menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 178.

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi Indonesia

	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Real GDP Growth</i>	6,5	6,3	5,8	5,7	6,3
<i>Inflation (CPI), period average</i>	5,4	4,3	7,0	5,4	4,7
<i>Short-term Interest Rate</i>	6,9	5,9	6,1	7,3	6,4
<i>Fiscal Balance (%GDP)</i>	-1,1	-1,9	-2,2	-2,2	-2,0
<i>Current Account Balance (\$ billion)</i>	1,7	-24,4	-32,5	-26,8	-26,8
<i>Current Account Balance (%GDP)</i>	0,2	-2,8	-3,7	-3,1	-2,7

Sumber: *The OECD Economic Outlook Vol. 2014/ 1.*²⁰

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami dinamika yang masih dapat digolongkan stabil. Sebenarnya tingkat perekonomian Indonesia pada tahun 2015 tidak menunjukkan angka yang lebih baik dari yang ditunjukkan pada tahun 2011. Hal ini tergolong wajar mengingat kondisi di Eropa dan negara besar lainnya yang mengalami krisis ekonomi. Kondisi tersebut semakin buruk dengan adanya *Arab Spring* yang terjadi di sebagian besar negara penghasil minyak di Timur Tengah.

Pendapatan yang positif menggambarkan tingkat pertukaran yang rendah dan permintaan domestik yang lemah.²¹ Permintaan domestik yang lemah membuat Indonesia tidak menjadi pangsa pasar potensial lagi. Namun, kondisi tersebut mendorong industri Indonesia untuk mengeksport barang dan jasa hasil produksi, sehingga Indonesia mengalami surplus perdagangan.

Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia, menunjukkan dinamika yang tidak sejalan dengan net ekspor.²² Perhatikan tabel berikut:

²⁰ OECD, *The OECD Economic Outlook*, Vol. 1/2014, (Paris: OECD Publishing, 2014), hlm. 206.

²¹ *Ibid.*, hlm. 205.

²² Dewi Ernita, et.al., "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, Januari 2013.

Tabel 2. Persentase Tingkat Konsumsi dan Net Ekspor Indonesia Sebelum Pemberlakuan MP3EI

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Konsumsi (%)	3,8	3,9	4,9	3,9	3,2	5,0	5,3	4,8	4,6
Net Ekspor (%)	8,9	18,6	47,5	-38,9	12,8	6,4	7,6	12,4	7,4

Sumber: Bank Indonesia dan BPS 2010

Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa net ekspor Indonesia sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2005. Penurunannya mencapai 86,4 poin dari tahun sebelumnya, sedangkan tingkat konsumsi hanya turun 1%. Sementara itu, peningkatan net impor terbesar terjadi pada tahun 2006, dengan penurunan tingkat konsumsi sebesar 0,7%.

MP3EI sudah menunjukkan pencapaian yang baik sejak awal kemunculannya. MP3EI sudah melaksanakan *Groundbreaking* proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur. Total nilai investasi tersebut sebesar Rp 499,5 triliun yang terdiri dari

Rp 357,8 triliun untuk 56 proyek sektor riil dan Rp 141,7 triliun untuk 38 proyek infrastruktur. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut berasal dari pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemerintah menangani 24 proyek dengan total dana sebesar Rp 71,6 triliun, BUMN menangani 24 proyek yang bernilai total Rp 131,0 triliun, swasta mengerjakan 38 proyek yang bernilai Rp 168,6 triliun, dan KPS menangani 8 proyek yang bernilai total Rp 128,3 triliun.²³

Untuk mendukung implementasi MP3EI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2012. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa program peningkatan dan pengembangan ekspor Indonesia difokuskan pada: (i) penguatan daya saing ekspor melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial serta peningkatan desain produk ekspor; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas dari fasilitas perdagangan, melalui penerapan dan peningkatan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE) dan lembaga lainnya; (iii) pembentukan tim

²³ Sholeh, "Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.

nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) untuk memperkuat peran Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI); (iv) peningkatan promosi; (v) pengembangan ekspor daerah dan pemberian dorongan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta lembaga keuangan di daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan ekspor produk UMKM daerah; (vi) peningkatan diplomasi perdagangan dalam forum atau organisasi internasional, seperti AEC, APEC, WTO; dan (vii) peningkatan koordinasi dalam penanganan isu-isu perdagangan internasional. Diplomasi perdagangan dan ekonomi merupakan hal yang terpenting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan promosi potensi Indonesia.²⁴

Perbaikan makroekonomi Indonesia ini tidak membuatnya terbebas dari krisis. Perekonomian Indonesia masih rentan terhadap krisis ekonomi dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas karena tingkat makroekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).²⁵ Oleh karena itu, pemberlakuan MP3EI masih berada pada tataran makroekonomi dan belum mampu menjangkau peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Pasar Bebas Asia Tenggara 2015

Prakarsa pembentukan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara sudah muncul sejak tahun 1972. Prakarsa ASEAN tersebut lebih banyak berupa *declarations of intent*, tetapi pelaksanaannya tergolong lambat. ASEAN tidak membangun kelembagaannya untuk melaksanakan berbagai prakarsa ekonomi tersebut.²⁶

Untuk merealisasikan prakarsa tersebut, ASEAN membentuk KEA. Pelaksanaan KEA tersebut ditempuh melalui implementasi komitmen dengan target waktu yang dibagi ke dalam empat periode, yaitu tahun 2008—2009, 2010—2011, 2012—2013, dan 2014—2015.²⁷ Pelaksanaan KEA dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka (*open*), berwawasan ke luar (*outward-looking*), inklusif (*inclusive*), dan

²⁴ Mahfudz Siddiq, “Indonesia Butuh Politik Luar Negeri Berorientasi Ekonomi”, *Jurnal Diplomasi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2012.

²⁵ P. Eko Prasetyo, “The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”, *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, September 2008.

²⁶ Mahfudz Siddiq, *op. cit.*

²⁷ ASEAN Secretariat, *The ASEAN Charter*, (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2008), hlm. 54.

berorientasi pasar (*market-driven*) dengan tetap memperhatikan kerja sama multilateral dan perbedaan tingkat pengembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.²⁸

Hubungan kerja sama ASEAN-Tiongkok sudah terjalin sejak tahun 1991, tetapi dikukuhkan sebagai kemitraan penuh pada tahun 1996.²⁹ Pada bulan November 2002, ASEAN dan Tiongkok menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* (ACFTA) yang mulai berlaku pada tahun 2010 untuk negara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Sementara itu, negara lainnya, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, berlaku pada tahun 2015.³⁰

Pada KTT ke-12 di Chaam, Hua Hin, Thailand pada bulan Oktober 2009, ASEAN dan Tiongkok sudah menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU), yaitu Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat ASEAN-Tiongkok; Nota Kesepahaman Kerja sama di Bidang Hak dan Kekayaan Intelektual; dan *Technical Regulations and Conformity Assessment*.³¹

Pengaruh *String of Pearl* Tiongkok terhadap Pencapaian MP3EI

Hubungan kerja sama ASEAN dan Tiongkok di bidang perdagangan, secara teknis, diatur dalam *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic of Tiongkok*. Tujuan kerjasama ASEAN-Tiongkok meliputi (1) penguatan dan peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara anggotanya; (2) memajukan liberalisasi serta meningkatkan perdagangan barang dan jasa; (3) melebarkan area kerjasama untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antar anggota; dan (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif bagi negara anggota ASEAN yang baru serta menjembatani jarak yang berkembang antar anggota.³²

²⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 169-170.

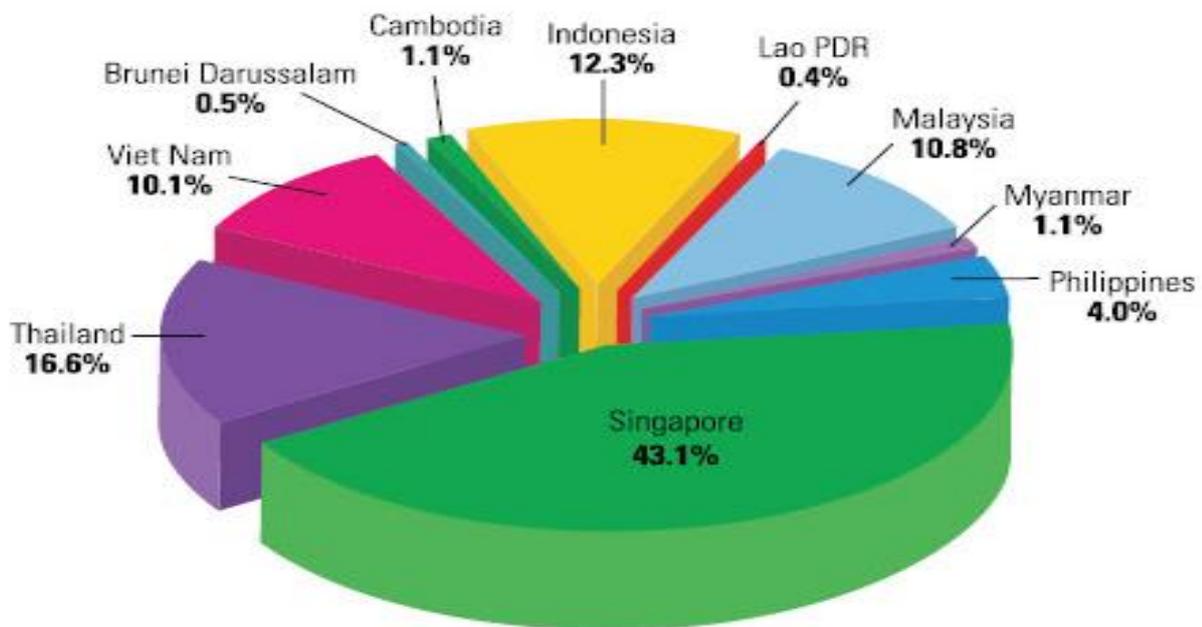
³¹ *Ibid.*, hlm. 170.

³² Suryani Indriastuti, "Pembentukan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area) dan Dampaknya bagi Petani di Indonesia", *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2005.

Salah satu bentuk dari kerja sama ASEAN dengan Tiongkok adalah perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas ASEAN dengan Tiongkok terdapat proyek pengurangan dan penghapusan tarif, yang terbagi dalam tiga kelompok atau model, yaitu *Early Harvest Program (EHP)*, *Exclusion List Program (ELP)*, dan *General Exeptions*. EHP diberlakukan untuk mendorong kesiapan dari negara-negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dalam EHP, negara yang sudah mempunyai kesiapan untuk melakukan ekspor diwajibkan untuk menurunkan tarifnya sesuai kesepakatan yang ada. Program EHP diberlakukan dalam kerangka kerja penurunan hambatan tarif dan nontarif hingga tahun 2010.

Dalam ELP, setiap negara berhak untuk mempertimbangkan penurunan tarifnya terhadap produk-produk yang tidak termasuk dalam kategori *early harvest*. Hak tersebut diberikan karena produk-produk tersebut bersifat sangat sensitif dan berpengaruh terhadap perekonomian rakyat. Sementara itu, General Exeption adalah kesepakatan untuk tidak memberlakukan peraturan penurunan tarif terhadap produk-produk yang mempunyai nilai historis, artistik, arkeologis, serta berkaitan dengan perlindungan moral, kemanusiaan, dan kesehatan.³³ Perhatikan diagram berikut ini:

Gambar 2. FDI Negara-negara Anggota ASEAN
by receiving country



Sumber: Mahfudz Siddiq, “Indonesia Butuh Politik Luar Negeri Berorientasi Ekonomi”, *Jurnal Diplomasi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2012.

³³ *Ibid.*

Data di atas menunjukkan bahwa FDI Indonesia sebagai negara terluas di kawasan Asia Tenggara tergolong kecil. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Singapura. Sebagai negara yang paling kecil dalam jumlah SDM dan luas wilayah, Singapura justru mendominasi investasi di kawasan Asia Tenggara.

Di bidang perdagangan, Indonesia juga tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Indonesia mengalami kenaikan jumlah perdagangan dengan Malaysia, Laos, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Namun, total kenaikan tersebut tidak lebih besar dari penurunan perdagangan bilateral dengan Vietnam dan defisit besar dengan Singapura, Thailand, dan Brunei.³⁴ Hal tersebut dapat diartikan sebagai defisit dalam neraca perdagangan untuk Indonesia

Kondisi domestik Indonesia juga memengaruhi kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. MP3EI yang belum mempunyai kesiapan yang optimal untuk menghadapi KEA, juga akan mendapatkan tekanan dari pemerintah yang baru. Joko Widodo sebagai presiden terpilih Indonesia diperkirakan akan lebih berfokus pada perubahan administratif, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan sosial.³⁵ Fokus pemerintahan Joko Widodo ini mempunyai implikasi yang baik terhadap peningkatan investasi Indonesia. Namun, dalam tanggapan yang diberikan Joko Widodo terkait permasalahan perekonomian, dia akan mengurangi impor bahan makanan.³⁶

Kondisi perekonomian dan perdagangan internasional Tiongkok dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Dalam pertumbuhan ekonomi, Tiongkok mencapai angka 7,7% pada tahun 2014 dan diperkirakan akan stabil pada angka tersebut hingga tahun 2018, sedangkan Indonesia berada pada angka 6,0% pada periode yang sama.³⁷ Kebijakan Tiongkok sudah berfokus pada perubahan efisiensi keuangan melalui perubahan institusional, sedangkan Indonesia masih berkutat pada permasalahan sosial, seperti penanggulangan bencana dan pendidikan.³⁸ Selain kedua perbedaan tersebut,

³⁴ Mahfudz Siddiq, *op. cit.*

³⁵ Deyi Tandan Zhixiang Su, "ASEAN Economics: Cyclical and Structural Forces at Play", *ASEAN Economics Chartbook*, (Hongkong: Morgan Stanley, 2014), hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁷ OECD, *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014 beyond the Middle-Income Trap*, (Paris: OECD Publishing, 2013), hlm. 2.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8

Tiongkok mempunyai kelebihan lain yang justru menjadi hal yang mulai ditakuti oleh negara-negara Barat, yaitu monopoli pasar.

Tiongkok membentuk *state-owned enterprises*, yang menjadi saingan dari *Multinational Corporations*(MNCs). Bentuk usaha tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan pengaruh Tiongkok di negara-negara dengan pasar baru. Bahkan, bentuk perusahaan ini juga mampu membeli aset yang dimiliki oleh perusahaan Barat.³⁹

Menurut Lovel, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dan menunjukkan pola interaksi antarnegara, yaitu struktur sistem internasional; persepsi elit; strategi negara-bangsa lain; dan kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.⁴⁰ Keempat faktor itu juga yang akan mempengaruhi strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi SoP Tiongkok. Keempat faktor tersebut menunjukkan struktur interaksi antara Indonesia dan Tiongkok.

Tinjauan atau analisis strategi yang dibentuk Indonesia terhadap Tiongkok dapat dilihat dalam bagan berikut.

Bagan 2. Bagan Analisis Strategi Indonesia dalam Menghadapi Strategi Tiongkok

Kapabilitas Indonesia Superior			
SoP Tiongkok sebagai Strategi yang Mengancam	<i>Confrontation Strategy</i>	<i>Leadership Strategy</i>	SoP Tiongkok sebagai Strategi yang Mendukung
	<i>Accomodation Strategy</i>	<i>Concordance Strategy</i>	
Kapabilitas Indonesia Inferior			

Sumber: John P. Lovel, *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970), hlm. 98—101 (dengan perubahan).

Jika kapabilitas Indonesia mempunyai kedudukan superior terhadap Tiongkok, Indonesia dapat menerapkan strategi yang bersifat konfrontatif atau memimpin. Strategi konfrontatif dapat diterapkan jika SoP Tiongkok dianggap sebagai ancaman. Sementara

³⁹ National Intelligence Council, "Nonstate Actors: Impact on International Relations and Implications for the United States", *NIC-Eurasia Group Seminars*, (Washington, D.C.: National Intelligence Council, 2007), hlm. 3.

⁴⁰ John P. Lovel, *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970), hlm. 98—101.

itu, jika SoP Tiongkok dianggap sebagai dukungan terhadap pencapaian kepentingan nasional Indonesia, strategi yang dapat digunakan adalah *leadership strategy*.

Jika kapabilitas Indonesia bersifat interior terhadap Tiongkok, Indonesia dapat menerapkan *accommodation strategy* atau *concordance strategy*. SoP Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman tidak akan mampu dihadapi oleh Indonesia yang mempunyai kapabilitas yang lebih kecil daripada Tiongkok. Untuk menjaga kepentingan nasionalnya, Indonesia dapat menerapkan *accommodation strategy*. Dalam strategi ini, Indonesia melakukan kerja sama dan menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. Strategi ini berbeda dengan *concordance strategy*. Dalam *concordance strategy*, Indonesia bersikap menuruti setiap keinginan dari Tiongkok. Hal tersebut hanya dilakukan jika SoP Tiongkok dianggap menguntungkan Indonesia.

Berikut ini adalah pembahasan empat faktor yang membentuk strategi Indonesia dalam menghadapi SoP Tiongkok.

a. *Struktur Sistem Internasional*

Struktur hubungan internasional saat ini bersifat multipolar dengan kemunculan berbagai aktor baru dalam hubungan internasional. Salah satunya adalah organisasi regional. Penguatan regionalisme di seluruh dunia menunjukkan adanya peningkatan kerja sama antarnegara yang berada dalam suatu wilayah yang sama. Begitu pula yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara menunjukkan peningkatan intensitas kerja sama antarnegara anggotanya. Pada tahun 2015, kerja sama antarnegara anggota ASEAN akan mengalami peningkatan signifikan karena adanya Komunitas ASEAN. Apalagi ASEAN juga menjalin kerja sama dengan beberapa negara lain yang berada di sekitar Asia Tenggara dan mempunyai peranan signifikan di era globalisasi.

Salah satu negara yang menjadi rekan kerja sama ASEAN adalah Tiongkok. Pada beberapa tahun terakhir, Tiongkok muncul sebagai polar baru dalam hubungan internasional. Tiongkok menunjukkan agresivitasnya dalam menyebarkan pengaruh ke berbagai negara.

Tiongkok mempunyai perjanjian kerja sama perdagangan bebas dengan ASEAN. Perjanjian tersebut yang disebut dengan ACFTA. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia sudah membuka pasarnya untuk barang produksi Tiongkok sejak tahun 2010. Namun, arus perdagangan tersebut akan mengalami peningkatan setelah KEA diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem internasional yang bersifat multipolar. Namun, polar-polar tersebut diikat dalam kerangka kerja sama di berbagai bidang, termasuk perekonomian. ASEAN dan Tiongkok merupakan dua dari banyak polar yang terbentuk di dunia. Indonesia merupakan bagian dari ASEAN. Oleh karena itu, setiap kerja sama yang dibentuk oleh ASEAN juga mengikat Indonesia sebagai negara anggotanya. Indonesia juga diwajibkan mengikuti KEA dan membuka pasarnya untuk perdagangan bebas dengan Tiongkok dalam kerangka ACFTA.

b. *Persepsi Elit*

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pemerintahan Joko Widodo lebih berfokus pada perubahan administratif, pengembangan infrastruktur dan kebijakan sosial. Perubahan administratif dan infrastruktur mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lahan untuk berinvestasi. Sementara itu, kebijakan sosial yang baik akan mampu melindungi kepentingan rakyat di era pasar bebas.

Namun, pemikiran Presiden Joko Widodo untuk mengurangi impor bahan makanan akan bertentangan dengan kesepakatan pasar bebas yang sudah terbentuk dalam kerangka ACFTA. Apalagi dengan implementasi KEA pada tahun 2015. Bahan makanan yang dikonsumsi oleh warga Indonesia, sebagian besar, berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan sintetis dengan menggunakan bahan-bahan kimia makanan yang sedang dikembangkan oleh beberapa ahli saat ini, masih belum mampu menggantikan makanan yang terbuat dari hewan dan tumbuhan. Jika impor bahan makanan dikurangi, Indonesia melanggar kesepakatan pasar bebas, khususnya yang berkaitan dengan EHP. Dalam EHP, hewan dan tumbuhan menjadi salah satu barang yang harus dipersiapkan negara-negara ASEAN untuk diekspor ke negara lain. Pada tahun 2015, semua negara di

kawasan Asia Tenggara harus sudah siap dengan perdagangan bebas untuk barang-barang yang tergolong *early harvest*, termasuk hewan dan tumbuhan.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan persepsi elit politik, terutama kepala negara dan pemerintahan Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kinerja kabinet Joko Widodo akan merujuk pada upaya menjaga pencapaian rakyat. Sementara itu, persepsi parlemen masih belum dapat dipastikan karena kondisi perpolitikan yang masih belum stabil. Anggota legislatif dengan latar belakang partainya akan menunjukkan persepsi yang berbeda mengenai pasar bebas ASEAN 2015. Oleh karena itu, dalam analisis ini persepsi elit yang digunakan hanya yang berasal dari presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

c. *SoP Tiongkok di Wilayah Indonesia*

Hal yang tidak dapat dipungkiri, SoP Tiongkok melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini berdampak pada pembangunan di pulau-pulau Indonesia yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka. Dalam kerangka MP3EI, pembangunan Koridor Sumatera dan Kalimantan mendapatkan pengaruh SoP yang paling besar. Selain berbatasan langsung dengan jalur yang dilalui SoP Tiongkok, kedua koridor tersebut merupakan pusat energi cadangan, sumber daya alam, dan pertambangan.

SoP Tiongkok melewati jalur-jalur yang mengandung kekayaan sumber daya energi. Hal ini yang mendasari pemikiran bahwa ada kepentingan nasional Tiongkok yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi rakyatnya. Sementara itu, Sumatera dan Kalimantan merupakan pusat energi cadangan nasional Indonesia dan berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka, yang merupakan jalur utama dalam SoP Tiongkok. Oleh karena itu, SoP Tiongkok dapat dipastikan akan memengaruhi pembangunan Koridor Sumatera dan Kalimantan dalam bidang energi.

Koridor Sumatera tidak hanya dipengaruhi secara langsung dalam bidang pengolahan energi, tetapi juga dalam upaya pengamanan Selat Malaka. SoP Tiongkok mengangkat Selat Malaka sebagai bagian dari jalur strategis

kepentingannya untuk mencapai Teluk Persia. Hal tersebut mendorong Tiongkok untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengamanan Selat Malaka dari perompakan.

Upaya tersebut akan memberikan peluang kepada Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di Koridor Sumatera. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak pada kerja sama pertahanan yang sudah berlaku antara Indonesia dengan India. Selama ini hubungan antara India dan Tiongkok tidak berjalan harmonis. Oleh karena itu, keterlibatan Tiongkok dalam pengamanan Selat Malaka merupakan benturan kepentingan antara India dan Tiongkok.

Benturan kepentingan yang terjadi antara dua negara mitra Indonesia tersebut berdampak pada kondusivitas laut dan Pulau Sumatera. Kondisi yang tidak kondusif akan menghambat pembangunan Koridor Sumatera. Jika pembangunan Koridor Sumatera terhambat, pembangunan di koridor-koridor yang lain juga akan terganggu karena adanya konektivitas antarkoridor. Pada tataran nasional dan regional, Indonesia akan mengalami kegagalan dalam menghadapi KEA karena integrasi nasional tidak tercapai dan konektivitas terhadap negara mitra ASEAN terganggu.

Berdasarkan hal tersebut, SoP Tiongkok yang melewati wilayah Indonesia memberikan dampak yang cukup besar terhadap pencapaian MP3EI. Dampak tersebut juga akan memengaruhi kemampuan Indonesia dalam persaingan di pasar bebas ASEAN yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Oleh karena itu, SoP Tiongkok merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan strategi menghadapi Tiongkok.

d. *Kapabilitas Tiongkok*

Ada tiga strategi yang diterapkan Tiongkok, yaitu SoP, *Going Out*, dan monopoli pasar. Ketiga strategi tersebut saling berkaitan dan memperkuat perekonomian Tiongkok. Ketiga strategi tersebut juga memengaruhi kapasitas dan kapabilitas Tiongkok dalam kerja sama dengan ASEAN, sebagai organisasi regional, dan Indonesia, sebagai mitra bilateral.

Peningkatan konsumsi masyarakat dan potensi produksi, dalam strategi *Going Out*, membentuk keseimbangan perdagangan dalam negeri Tiongkok. Peningkatan konsumsi menjadikan Tiongkok sebagai negara yang menarik untuk investasi atau tujuan ekspor. Sementara itu, peningkatan produksi merupakan senjata Tiongkok untuk mendorong produktivitas rakyatnya, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

Strategi tersebut diimbangi dengan adanya *stated-owned enterprises*. Perusahaan yang bernaung di bawah pemerintahan Tiongkok menghambat pengembangan industri asing. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rakyat Tiongkok digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga industri mengalami peningkatan dan ekspor dapat diakomodasi dengan baik melalui *stated-owned enterprises*.

Kedua strategi tersebut meningkatkan perekonomian Tiongkok. Peningkatan kemampuan ekonomi dan keuangan mendukung peningkatan kapabilitas Tiongkok dalam menjalin kerja sama dengan negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks SoP, kemampuan ekonomi dan keuangan Tiongkok yang baik juga mendorong kapabilitasnya dalam menguasai jalur yang dilalui SoP.

Kapabilitas Tiongkok juga ditunjukkan dalam kemampuannya menangani konflik di Laut Tiongkok Selatan. Dalam konflik tersebut, Tiongkok menghadapi empat negara anggota ASEAN dan satu negara yang diakuinya sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Namun, Tiongkok mampu mengendalikan permasalahan tersebut, sehingga kondusivitas kerja sama tetap terjaga.

Kapabilitas Tiongkok juga dapat dilihat melalui kerja sama yang dilakukannya dengan negara yang bukan anggota ASEAN dan posisinya di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tiongkok tergabung dalam *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) dan BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok). Selain itu, Tiongkok juga merupakan salah satu negara pemegang hak veto. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas Tiongkok lebih baik daripada Indonesia. Kapabilitas Indonesia bersifat inferior terhadap Tiongkok.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, Indonesia mempunyai kapabilitas yang bersifat inferior terhadap Tiongkok, sehingga pilihan strategi yang dapat diterapkan adalah *accommodation strategy* atau *concordance strategy*. Pilihan tersebut semakin spesifik pada *accommodation strategy* karena SoP Tiongkok bersifat mengancam pencapaian MP3EI Indonesia.

Dalam strategi tersebut, Indonesia harus mengadakan kerja sama dengan Tiongkok dalam berbagai aspek, terutama ekonomi. Indonesia harus mampu melihat peluang-peluang kerja sama dengan Tiongkok. Kerja sama yang terbentuk dengan Tiongkok akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan posisi penting dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, sehingga risiko yang mungkin dimunculkan juga semakin kecil. Kerja sama yang dilakukan dapat berbentuk peluang untuk pemerintah Tiongkok ikut serta dalam pembangunan di koridor selain Sumatera dan Kalimantan. Jika Tiongkok menginginkan kerja sama di Koridor Sumatera dan Kalimantan, Indonesia dapat menawarkan kompensasi-kompensasi yang menguntungkan Indonesia dan melindungi kepentingan rakyat di kedua pulau tersebut.

Hal yang sama juga berlaku untuk kerja sama dalam upaya pengamanan Selat Malaka. Indonesia tidak dapat mengabaikan kerja sama yang sudah dibentuk dengan India. Indonesia harus mencari ruang untuk kerja sama dengan Tiongkok sebagai bentuk akomodasi terhadap kepentingan Tiongkok di Selat Malaka.

Walaupun Indonesia bersikap akomodatif terhadap kepentingan dan strategi Tiongkok, pemanfaatan terhadap peluang-peluang yang ada juga harus ditingkatkan. Indonesia mempunyai sejumlah potensi yang dapat meningkatkan daya tawar dalam negosiasi dan diplomasi dengan Tiongkok. Pertama, Indonesia mempunyai wilayah yang letaknya strategis, termasuk Selat Malaka. Kepemilikan Indonesia atas Selat Malaka tidak dapat ditawarkan oleh Tiongkok. Apalagi Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang juga mempunyai kepentingan di Selat Malaka.

Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang besar. Bahkan, jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang besar untuk Tiongkok yang terus berupaya mengembangkan potensi industrinya.

Potensi lain yang dimiliki Indonesia adalah peranannya yang terus meningkat dan mendapatkan pengakuan dunia. Apalagi Indonesia mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam setiap upaya pengambilan keputusan di forum-forum ASEAN. Untuk menjaga kerja sama yang baik dengan ASEAN, Tiongkok harus menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

Posisi Indonesia semakin strategis dengan sikap netral yang ditunjukkan terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan. Posisi netral Indonesia merupakan ruang untuk Tiongkok menjalin kerja sama dengan ASEAN. Apalagi Indonesia menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara yang merupakan seteru Tiongkok, seperti Amerika Serikat, India, dan Australia. Oleh karena itu, Tiongkok sangat membutuhkan Indonesia dalam pelaksanaan strateginya.

Indonesia dapat menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam kerja sama dengan Tiongkok. Walaupun Tiongkok mempunyai kapabilitas yang lebih baik daripada Indonesia, posisi kunci kerja sama yang terjalin dengan ASEAN dan pencapaian SoP adalah Indonesia. Pembangunan koridor-koridor ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik jika Indonesia mampu memainkan peranannya sebagai pemeran kunci yang menentukan nasib Tiongkok. Jika Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut, SoP Tiongkok akan berubah dari yang bersifat ancaman menjadi dukungan terhadap pencapaian MP3EI.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SoP Tiongkok mempunyai pengaruh terhadap pencapaian MP3EI, khususnya dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pada dasarnya, SoP Tiongkok bersifat ancaman terhadap pencapaian MP3EI dan kapabilitas Indonesia hanya dapat menerapkan *accommodation strategy*. Namun, SoP dapat diubah menjadi dukungan untuk MP3EI jika Indonesia dapat memainkan peranan strategis dalam hubungan bilateral dan regional dengan Tiongkok.

Daftar Pustaka

Buku

- ASEAN Secretariat. 2008. *The ASEAN Charter*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2011. *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Lovel, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Pehrson, Christopher J. 2006. *String of Pearls: Meeting the Challenge of Tiongkok's Rising Power Across the Asian Littoral*. Carlisle: Strategic Studies Institute.
- Prabhakar, W. Lawrence S. 2009. "China's 'String of Pearls' in Southern Asia-Indian Ocean: Implication for India and Taiwan", dalam M.J. Vinod, et.al. (eds). *Security Challenges in the Asia-Pacific Region: The Taiwan Factor*. New Delhi: Viva Books International.
- Vinod, M.J., et.al. (eds). 2009. *Security Challenges in the Asia-Pacific Region: The Taiwan Factor*. New Delhi: Viva Books International.

Jurnal

- Beckman, Robert. 2013. "The South Tiongkok Sea: the Evolving Dispute between Tiongkok and Her Maritime Neighbours". *Geomatics World*. Vol. 21. No.3.
- Ernita, Dewi, et.al. 2013. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1. No.2.
- Indriastuti, Suryani. 2005. "Pembentukan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ASEAN-Tiongkok Free Trade Area) dan Dampaknya bagi Petani di Indonesia". *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*. Vol. 1. No.2.
- Kim, Shee Poon. 2011. "An Anatomy of Tiongkok's 'String of Pearls' Strategy". *The Hikone Ronso*. No. 387.
- Marantidou, Virginia. 2014. "Revisiting Tiongkok's 'String of Pearls' Strategy: Places 'with Chinese Characteristics' and Their Security Implication". *Issues & Insights*. Vol. 14.No.7.
- Prasetyo, P. Eko. 2008. "The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas". *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol. 1. No.1.
- Sholeh. 2013. "Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 1. No.2.
- Siddiq, Mahfudz. 2012. "Indonesia Butuh Politik Luar Negeri Berorientasi Ekonomi". *Jurnal Diplomasi*. Vol. 4. No.1.

Laporan

National Intelligence Council. 2007. "Nonstate Actors: Impact on International Relations and Implications for the United States". *NIC-Eurasia Group Seminars*. Washington, D.C.: National Intelligence Council.

OECD. 2013. *Economic Outlook for Southeast Asia, Tiongkok and India 2014 beyond the Middle-Income Trap*. Paris: OECD Publishing.

OECD. 2014. *The OECD Economic Outlook*. Vol. 1/2014. Paris: OECD Publishing.

Tan, Deyi dan Zhixiang Su. 2014. "ASEAN Economics: Cyclical and Structural Forces at Play". *ASEAN Economics Chartbook*. Hongkong: Morgan Stanley.

Undang-undang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2010.

